



PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK ANTARA PENGUNGSI ROHINGYA DAN MASYARAKAT LOKAL INDONESIA

Oleh

Yulian Azhari¹, Wilopo²

^{1,2}Indonesian Defense University

E-mail: ¹azhariyulian6@gmail.com, ²wilopo02@gmail.com

Article History:

Received: 14-02-2022

Revised: 20-02-2022

Accepted: 21-03-2022

Keywords:

Pengungsi, Rohingya,
Masyarakat Lokal

Abstract: Pada pertengahan tahun 2015, kawasan Asia Tenggara dikejutkan oleh tersebarnya laporan tentang sejumlah besar pengungsi Rohingya yang berada di atas kapal karam di lepas pantai timur Aceh Indonesia. Konflik etnis Rohingya telah lama terjadi di Myanmar. Akibatnya, ribuan orang Etnis Rohingya meninggalkan rumah mereka. Situasi geografis Indonesia menjadikan Indonesia sebagai tujuan penting bagi para pencari suaka yang menuju benua Australia dan Amerika sebagai tempat pengungsian mereka. Banyaknya jumlah pengungsi Rohingya yang masuk ke negara Indonesia berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji upaya pencegahan konflik antara pengungsi Rohingya dengan masyarakat lokal Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan penekatan studi pustaka yang dikumpulkan dari beberapa sumber tertulis. Hasil penelitian adalah Pada umumnya konflik dapat muncul karena adanya perbedaan pikiran, ide, perkataan dan tindakan. Dari sekedar konflik simbolik hingga konflik fisik. Efeknya pun beragam, dari ringan hingga berat. Sebelum konflik meningkat, pemerintah akan berusaha mencegahnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik yang akan terjadi di wilayah setempat.

PENDAHULUAN

Pada pertengahan tahun 2015, kawasan Asia Tenggara dikejutkan oleh tersebarnya laporan tentang sejumlah besar orang yang berada di atas kapal karam di lepas pantai timur Aceh Indonesia, dan di pulau Langkawi Malaysia. Mereka adalah serombongan pengungsi Myanmar dan Bangladesh yang terapung-apung di laut, kemudian ditemukan oleh para nelayan dan dibantu naik ke kapal. Kedatangan para imigran tersebut mengejutkan masyarakat dan pemerintah Indonesia. Tidak hanya Indonesia dan pihak berwenang, tetapi juga masyarakat internasional, regional dan berbagai organisasi-organisasi kemanusiaan dikejutkan oleh temuan para nelayan Aceh atas pengungsi Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh di wilayah perairan pantai Indonesia, terlebih lagi dengan kondisinya



yang sangat mengkhawatirkan.¹ Etnik Rohingya merasa tidak tahan akan perlakuan kekerasan dari pemerintahnya sendiri, lalu melarikan diri dari tanah leluhurnya di wilayah Rakhine Myanmar.

Konflik etnis Rohingya telah lama terjadi di Myanmar. Akibatnya, ribuan orang Etnis Rohingya meninggalkan rumah mereka. Banyak rumah dan desa bekas suku Rohingya yang sekarang tinggal reruntuhan. Masalah krisis sosial sedang meningkat di wilayah ini.² Etnis Rohingya tidak hanya mengalami kekerasan, tetapi juga penderitaan, kesedihan, dan pengasingan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut mereka sebagai etnis yang paling teraniaya dan tidak memiliki kewarganegaraan.

Ketegangan agama di Myanmar antara Islam dan Buddha paling dikenal sebagai ketegangan etnis Rohingya dan Rakhine. Meskipun konflik ini terjadi di Myanmar, hal itu berdampak pada masyarakat internasional, terutama di negara-negara yang dekat dengan Myanmar seperti Indonesia, Malaysia dan Bangladesh. Rohingya menjadi sasaran diskriminasi oleh pemerintah Myanmar, dan banyak yang melarikan diri ke negara tetangga.³ Dalam sejarah konflik global tersebut, komunitas Rohingya merupakan kasus yang menarik perhatian dunia saat ini, bukan hanya karena kekerasan yang terus berlangsung tetapi juga karena upaya genosida.

Fakta dengan jelas menunjukkan bahwa ketegangan rasial begitu sulit untuk diselesaikan sehingga akan memakan waktu lama dalam upaya perubahan untuk perdamaian. Apalagi ketegangan rasial bisa menjadi rumit jika bertentangan dengan dimensi budaya, di mana beberapa kelompok etnis memiliki identitas budayanya sendiri sehingga sulit untuk bersatu, tanpa pemahaman yang jelas satu sama lain sebagai orang yang memiliki kedamaian dan peradaban.

Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis, dengan diapit dua benua yakni Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Situasi daratan ini menjadikan Indonesia sebagai tujuan penting bagi para pencari suaka yang menuju benua Australia dan Amerika.⁴ Letak geografis Provinsi Aceh yang berada di tepi Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional menjadikan Aceh bagian pertama dari negara Indonesia tempat para pengungsi berlayar di tengah lautan. Demikian pula perdagangan nelayan asal Aceh yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menjadi faktor penting dalam mendekatkan pengungsi Rohingya ke Aceh dan Indonesia. Kawasan perbatasan ini kemungkinan akan dijadikan sebagai pintu gerbang bagi warga negara asing (WNA) yang mencari perlindungan dan masuk ke wilayah Indonesia.

Pengungsi internasional dengan segala macam problematika yang dihadapinya telah menjadi fakta sosial yang tidak dapat dipungkiri dalam agenda politik dan kebijakan sebuah negara, termasuk di Indonesia. Betts dan Loescher, memasukkan isu pengungsi internasional dalam ruang lingkup hubungan internasional. Isu pengungsi internasional

¹ Zulkarnain, Indra Kusumawardhana. *Bersama Untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya Di Aceh 2015*. Jurnal HAM, Vol 11, No 1, April 2020

² Glen Matthew, *Kepentingan Nasional dan Diplomasi ala Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya di Myanmar*, Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIII, No.1, Januari - Juni 2020

³ M. Angela Merici Siba, Anggi Nurul Qomari'ah. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya*. Islamic World and Politics. Vol.2. No.2 July-December 2018 ISSN: 2614-0535 E-ISSN: 2655-1330

⁴ Atik Krustiyati, *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia*, Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 UBAYA, 2012. Hlm 174



berhubungan dengan kerjasama internasional, globalisasi, isu HAM, organisasi internasional, kompleksitas rezim, peran non state aktor, regionalisme dan kajian keamanan.⁵ Indonesia sebagai negara ASEAN, dan tanpa menghilangkan rasa hormatnya pada Pemerintah Myanmar yang berdaulat, telah melakukan beberapa rencana dan diplomasi terkait konflik etnis yang bermula di negara bagian Rakhine ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi krisis di Rohingya dengan mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai perwakilan dari Pemerintah Indonesia pada 2017 lalu untuk melakukan konsolidasi dengan pemerintah Myanmar.

Masalah pengungsi dan imigran di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena berpotensi terjadinya konflik dengan masyarakat lokal. Pada umumnya konflik dapat muncul karena adanya perbedaan pikiran, ide, perkataan dan tindakan. Kemungkinan adanya konflik antar etnis Rohingya yang bermigrasi ke masyarakat Indonesia yang berpotensi konflik atas masalah ideologi, agama, sosial, hukum, ekonomi, regional, maupun fanatisme kedaerahan. Untuk itu, artikel ini berupaya mengkaji upaya pencegahan potensi konflik antara pengungsi Rohingya dengan masyarakat Indonesia

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu upaya untuk memahami perspektif yang berbeda dalam suatu proses penelitian, dengan menggunakan teknik analisis isi dan analisis kepustakaan. Teknik analisis isi adalah metode penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari teks. Atau dengan kata lain, analisis isi adalah proses penelitian yang berusaha mengungkap ide-ide yang diungkapkan dan tersembunyi dari seorang penulis yang termanifestasi dan terpendam. Sedangkan penelitian kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel, dan buku referensi yang membahas topik-topik yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pencarian difokuskan pada literatur yang diterbitkan hingga tahun 2022. Hasil penelitian ini direduksi dan diambil yang sejalan dengan topik penelitian sebagai bahan referensi dalam penulisan jurnal ini, yaitu terkait mengenai Upaya Pencegahan Potensi Konflik Antara Pengungsi Rohingya Dan Masyarakat Lokal Indonesia

DISKUSI

Sejarah Konflik Etnis Rohingya di Myanar

Wilayah Myanmar terbagi menjadi 7 negara bagian yang dinamai berdasarkan etnis minoritas. Sebagai wilayah yang terletak di Asia Tenggara, Myanmar memiliki ibu kota Yangon yang dikelilingi oleh beberapa negara yaitu China, India, Laos, Thailand, dan Bangladesh. Ada lebih dari 35 kelompok etnis, masing-masing dengan budaya dan bahasanya sendiri. Salah satu kelompok etnis terbesar adalah Burma (Bamar). Mereka berasal dari Sino-Tibet dan tinggal di dataran tengah Myanmar. Agama mayoritas etnis Burma adalah Buddhisme Theravada. Mereka juga menguasai pemerintah dan militer dan menjadi etnis mayoritas di Myanmar. Namun hal lain terjadi di negara bagian Rakhine, yang berbatasan dengan Bangladesh. Di wilayah ini terdapat etnis Rakhine yang beragama Islam/ Arakan. Jumlah etnis Rohingya diperkirakan meliputi 4% dari penduduk Rakhine, tetapi

⁵ Alexander Betts and Gil Loescher, *Refugees in International Relations*, Refugees in International Relations, 2011.



dibandingkan dengan umat Buddha Rakhine, Muslim Rohingya adalah kelompok minoritas.⁶

Rohingya dan Rakhine adalah dua kelompok etnis berbeda yang tinggal di wilayah Arakan yang sekarang dikenal sebagai Rakhine. Jika Rakhine adalah kelompok etnis yang mayoritas beragama Buddha, maka Rohingya adalah kelompok etnis yang mayoritas Muslim. Kebanyakan Rohingya adalah Muslim, tetapi pemerintah Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan mereka. Orang-orang Rakhine di wilayah Arakan memiliki sentimen yang sama dengan Myanmar. Beberapa wilayah Rakhine tempat tinggal Rohingya adalah Maungdaw, Buthidaung dan Rathedaung.

Rasisme yang dihadapi ini bersifat global, karena kewarganegaraan mereka tidak diakui, apalagi Rohingya tidak termasuk dalam 135 etnis yang diakui Myanmar dalam amandemen Konstitusi Myanmar tahun 1982.⁷ Konflik di Myanmar terus berlanjut hingga pihak Burma tidak memahami Rohingya sebagai kelompok etnis. Pada tahun 2011, Presiden Thein Sein menyatakan bahwa *“Rohingya are not our people and we have no duty to protect them”* Presiden Sein menginginkan agar PBB melalui UNHCR mengelola pengungsi etnis Rohingya atau agar para pengungsi tersebut ditampung di negara ketiga.⁸ Etnis Rohingya juga menjadi korban diskriminasi dan pelanggaran HAM di negaranya, seperti: tidak diberikannya pengakuan kewarganegaraan, pembatasan pencarian kerja, penyitaan properti, kerja paksa, pembunuhan dan pemerkosaan terhadap perempuan Rohingya, serta banyak pembakaran rumah dan tempat ibadah.⁹

Pada Juli 2012 konflik memuncak dengan dengan kebakaran hebat yang melalap rumah-rumah warga Muslim Rohingya. Aksi kekerasan antara etnis Rakhine dan Rohingya memanas sejak bentrokan etnis Buddha Rakhine dengan Muslim Myanmar dipicu oleh penemuan seorang mayat wanita etnis Rakhine yang diduga menjadi korban pemerkosaan. Muslim Rohingya segera dituduh melakukan penjarahan dan pemerkosaan, meskipun tidak ada laporan resmi dari aparat berwenang. Ini membuat etnis Rakhine menyerang rombongan 10 Muslim Rohingya dan membunuh mereka. Hal ini menyebabkan kelompok etnis Rakhine menyerang sekelompok 10 Muslim Rohingya dan membunuh mereka. Kerusuhan menyebar ke banyak kota lain di Rakhine. Rumah Muslim Rohingya termasuk masjid dan pusat keramaian dibakar. Myanmar kemudian mengumumkan keadaan darurat militer pada Juni dan mengirim pasukan bersenjata berat ke Negara Bagian rakhine. Namun, kedatangan pasukan ini menjadi bencana bagi Muslim Rohingya. Pasukan pemerintah menembaki Muslim Rohingya yang dicap sebagai imigran ilegal di Bangladesh.¹⁰

Pada Maret 2015, pemerintah Myanmar mencabut kartu identitas Rohingya, merampas kewarganegaraan dan hak politik mereka. Kartu putih etnis Rohingya diumumkan tidak berlaku lagi pada tanggal 31 Maret 2015. Kartu putih adalah kartu identitas yang dikeluarkan untuk orang Myanmar tetapi mereka yang tidak memiliki status

⁶ Nur, Sandy Ikfal Raharjo, 2015. *Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine Myanmar Tahun 2012-2013*. Jurnal Kajian Wilayah, Vol.6 No. 1.

⁷ Khairunnisa Simbolon, *Sikap Thailand Dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Dalam Pendekatan Konstruktivis*, Jurnal PIR Vol.2 No. 1 Agustus 2017

⁸ Masyarakat ASEAN, *“Rohingya: Antara Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan”* Masyarakat ASEAN Edisi 8 Juni 2015. Jakarta, 2015.

⁹ Diambil dari Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) PAHAM Indonesia, *“Rohingya, 101 Data dan Fakta”*. <http://indonesia4rohingya.net/about/>

¹⁰ Simela Victor Muhamad, *Tragedi Kemanusiaan Rohingya*, Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. IV, No. 15/1/P3DI/Agustus/2012



resmi seperti penduduk, penduduk asosiasi, penduduk netral, atau warga negara asing . Tanpa kartu identitas tersebut, Etnis Rohingya takut ditangkap dan dipenjarakan sebelum pemilu Myanmar.¹¹ Peristiwa ini menyebabkan pemberontakan dan perlawanan terhadap tindakan kekerasan yang meliputi pembunuhan, penyiksaan, kebakaran rumah dan pengusiran paksa.

Melihat situasi tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *Uni Eropa* (UE) mengutuk kekerasan dalam konflik tersebut, tetapi hanya mengutuk dan menyalahkan pemerintah Myanmar. Organisasi lain seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* (HAM) di seluruh dunia percaya bahwa pemerintah Myanmar telah secara sistematis mendiskriminasi Rohingya dan menyebabkan penderitaan yang tak terhitung.¹² Akar penyebab ketegangan rasial adalah ketidakmampuan pemerintah, baik secara nasional maupun nasional, untuk mencegah eskalasi ketegangan rasial. Kekuatan yang ada juga sangat lemah, sehingga tidak bisa menjamin keselamatan individu.¹³

Kekerasan terhadap Muslim Rohingya telah berlangsung selama beberapa dekade. Myanmar menganggap Rohingya sebagai bukan bagian dari kelompok etnis pertama negara itu, sehingga mereka tidak diakui sebagai warga negara yang sah dari Myanmar. Mereka tidak hanya harus mendapat tindakan kekerasan dari negara, tetapi juga dari sesama warga Myanmar karena kebijakan pemerintah Myanmar yang sering rasis. Akhirnya, para pengungsi meninggalkan Myanmar untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan untuk alasan keamanan. Pelarian adalah pilihan terakhir bagi mereka yang ingin melarikan diri dari penganiayaan ini, proses migrasi ke Laut Andaman yang berbahaya yang telah berlangsung sejak 1960-an. Mereka tersebar di wilayah tetangga yang mencari perlindungan, seperti Bangladesh dan negara-negara ASEAN. Pasca masuknya pengungsi Rohingya ke negara ASEAN, ASEAN akhirnya mulai mengambil sikap tegas terhadap masalah tersebut. Hal ini karena masuknya pengungsi juga menimbulkan tantangan keamanan dan ancaman bagi negara-negara anggota ASEAN.

Pengelolaan pengungsi di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akar kata dari pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman), pengungsi adalah orang / penduduk yang mengungsi atau pindah ke negara lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa negara asalnya.¹⁴

Di dalam Konvensi PBB tahun 1951 pasal 1 tentang status pengungsi "*A refugee is someone who has been forced to flee his or her country because of persecution, war, or violence. A refugee has a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group. Most likely, they cannot return home or are afraid to do so. War and ethnic, tribal and religious violence are leading causes of*

¹¹ Fajar Nugraha, 2015, *Malaysia Tolak Imigran Rohingya Kecuali Kapal Mereka Karam*, diakses dari <http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/05/13/125452/malaysia-tolakimigran-rohingya-kecuali-kapal-mereka-karam>,

¹² Triono. *Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya*. Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember. 2014

¹³ Anna Hartati Yulia. *Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar*. Jurnal Hubungan Internasional, (2013) Vol. 2 No. 1.

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 2008



refugees fleeing their countries". Menyatakan bahwa "pengungsi" adalah orang-orang yang memiliki ancaman nyata penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan (identitas), milik masyarakat sipil atau pendapat politik, di luar komunitas negara mereka sendiri dan ketidakmampuan, atau karena ketakutan bahwa orang tersebut tidak ingin menggunakan keamanan negaranya, atau orang yang tidak memiliki negara dan karena dia berada di luar negara di mana dia tinggal, karena fakta tentang itu, atau karena dia tidak bisa, takut, dia tidak ingin kembali ke tanah airnya.¹⁵

Tiga negara ASEAN menjadi tempat tujuan pengungsian Rohingya adalah Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ketiga negara tersebut telah sepakat untuk menerima pengungsi Rohingya selama satu tahun. Namun, ketiga negara tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan sebagai perhentian. Secara umum, para pengungsi ini menggambarkan Australia sebagai tujuan terakhir mereka karena mereka mengharapkan mendapatkan jaminan perlindungan politik dan keamanan yang akan diberikan oleh negara Australia.¹⁶



Gambar 1. Jalur pengungsian Etnis Rohingya

Dalam proses penanganan pengungsi dan imigran, sejumlah upaya dan prosedur telah dilakukan oleh berbagai aktor dan pemangku kepentingan yang bersangkutan, yaitu TNI, POLRI, Departemen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), IOM (*Organisasi Internasional of Migrasi*) dan lain-lain, termasuk proses penahanan atau pendeportasian pengungsi dan imigran yang melintasi Indonesia. Para imigran tersebut kemudian ditempatkan di RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) dibawah pengawasan otoritas imigrasi setempat sehingga pada proses penentuan status oleh UNHCR dan pada proses akhir setelah penentuan status pengungsi tersebut dipindahkan ke negara ke-3 atau dipulangkan ke negara asal mereka. Proses pengambilan keputusan pengungsi UNHCR memakan waktu 1-2 tahun atau lebih. Selama periode ini, dikhawatirkan kehadiran pengungsi dan imigran akan berdampak negatif terhadap ekonomi,

¹⁵ Pasal 1 (A) Konvensi Jenewa Mengenai *Status Pengungsi*, (*The Geneva Convention Relating to the Status of Refugees*) 28 Juli 1951.

¹⁶ Jati, I. (2018). "Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis". *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies (IKAT)*, 1(1): 17.



hubungan sosial, budaya, stabilitas keamanan dan sektor lainnya.¹⁷

Myanmar adalah sebuah wilayah yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Adanya organisasi *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) merupakan forum Majelis Nasional bagi berkumpulnya 10 negara yang tergabung menjadi anggota ASEAN. Indonesia, sebagai sesama negara ASEAN, dan tanpa menghilangkan rasa hormatnya pada Pemerintah Myanmar yang berdaulat, telah membuat sejumlah rencana dan diplomasi terkait konflik etnis yang dimulai di Rakhine State. Bantuan yang diberikan otoritas Indonesia kepada pengungsi Rohingya di Aceh telah membuka mata dunia untuk membantu penderitaan Rohingya, Myanmar.

Setelah Indonesia menyatakan siap menerima pengungsi Rohingya, langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan UNHCR Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan UNHCR. Berdasarkan hasil proses UNHCR, pemerintah Indonesia dan UNHCR melakukan tindakan berupa mencari negara ketiga yang siap menerima pengungsi Rohingya di Aceh. Kedua, menyediakan pengungsi dengan tempat penampungan sementara serta air bersih dan kebutuhan dasar lainnya. Ketiga, membuat undang-undang tentang pencari suaka dan pengungsi. Keempat, memfasilitasi proses relaps (pulang dan kesadaran diri); dan kelima, bekerja sama dengan negara-negara ASEAN, terutama anggota Konvensi 1951.¹⁸

Peran yang dimainkan oleh UNHCR dan IOM lebih kepada peran dan fungsi socio-humanitarian, mencakup pada bidang rekonstruksi, fasilitasi dan asistensi serta humanitarian assistance, seperti pendanaan untuk tempat penampungan sementara bagi para pengungsi, menyediakan perawatan kesehatan, pakaian, sandang dan pangan, air bersih serta pendidikan hingga pada pendampingan serta urusan keimigrasian. Sedangkan pekerjaan masyarakat setempat adalah lebih kepada peran dan fungsi *sociohumanitarian*, membantu akses perahu para pengungsi, memberikan dampak positif bagi para pengungsi (*psyco-maintenance*), penyediaan sandang dan pangan, pendampingan sosial dan pemberdayaan.

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNHCR menyediakan tempat penampungan sementara atau temporary shelter bagi para pengungsi Rohingya. UNHCR telah mendirikan shelter atau tempat penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya dan dioperasikan oleh IOM, sedangkan pemerintah daerah mendukung penyediaan lokasi kamp tersebut. Di tempat penampungan atau kamp sementara ini, pengungsi Rohingya tinggal sembari menunggu proses pemulangan atau repatriasi sukarela dan proses penempatan di negara ketiga yang bersedia menampung para pengungsi Rohingya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan UNHCR. Di dalam shelter atau kamp pengungsi sementara para pengungsi Rohingya ini terdapat sejumlah fasilitas yang disiapkan oleh pihak UNHCR dan IOM. Antara lain adalah tersedianya fasilitas air bersih, fasilitas kesehatan, tempat bermain anak, Mushollah, fasilitas olah raga dan fasilitas lainnya.

Setelah masuknya banyak pengungsi pada tahun 2015, Thailand dan Indonesia serta Malaysia mengadakan pertemuan di Putrajaya, Malaysia. Konferensi tersebut menghasilkan

¹⁷ Ridwan, Bambang Wahyudi, Ningsih Susilawati, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Potensi Konflik Antara Imigran Timur Tengah Dengan Masyarakat Lokal di Cisarua, Bogor, Jawa Barat*. Jurnal Damai dan Resolusi Konflik | April 2019 | Volume 5 Nomor 1

¹⁸ Zulkarnain, Indra Kusumawardhana. *Bersama Untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya Di Aceh 2015*. Jurnal HAM, Vol 11, No 1, April 2020



langkah langkah yang akan diambil oleh Indonesia, Malaysia dan Thailand terhadap isu Rohingya. Langkah tersebut adalah:

1. Melakukan operasi *Search and Rescue* (SAR) bagi para pengungsi yang masih terapung di laut
2. Melakukan patroli laut terkoordinasi dan memfasilitasi evakuasi maritim jika kapal pengungsi terdeteksi;
3. Memberikan bantuan kepada para migran yang tinggal di tiga negara, termasuk perumahan, makanan, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara UNHCR dan IOM dengan identifikasi dan memverifikasi pengungsi, termasuk mencari negara ketiga untuk proses pemulangan kembali;
5. Mengaktifkan sumber daya milik ASEAN *Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management* (AHA Centre) untuk mengatasi masalah ini.

Indonesia di bawah Presiden SBY melakukan pendekatan diplomatik dalam upaya mengirim surat kepada Presiden Thein Sein. Indonesia dan UNHCR juga bekerja sama untuk mengelola pengungsi Rohingya yang ditempatkan di Aceh dan Makassar. Indonesia juga mendukung OKI untuk membantu menyelesaikan konflik Rohingya. Termasuk menjadi pionir pembahasan konflik Rohingya di KTT ASEAN yang dibantu oleh PMI. Selain itu, otoritas Yudhoyono telah mengadopsi sistem berbagi teknologi untuk mendukung delegasi Myanmar dan Aceh.

Sedangkan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menanggapi krisis Rohingya dengan mengirimkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai duta besar Indonesia pada tahun 2017. Namun, penelitian laporan dari *Institute for Policy Analysis of Conflict* (2018) menunjukkan bahwa pemerintah Myanmar telah menolak bantuan kemanusiaan dari Indonesia. Bahkan, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintahan Aung San Suu Kyi, yang dipuji dunia atas perjuangannya untuk demokrasi, tampaknya menutup mata terhadap apa yang terjadi.¹⁹

Upaya mengatasi Konflik antara pengungsi rohingya dan masyarakat lokal Indonesia

Indonesia merupakan negara yang sejak awal paling antusias menangani pengungsi Rohingya Myanmar, di samping Malaysia dan Thailand. Ketertarikan terhadap keterlibatan Indonesia ini dapat dijelaskan oleh faktor sosial. Kedekatan demografis dan karena kultur masyarakat Indonesia pada umumnya serta masyarakat Aceh pada khususnya sangat mengedepankan nurani kemanusiaan menjadi penyebab lahirnya antusiasme itu. Masalah pengungsi dan imigran di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena berpotensi terjadinya konflik dengan masyarakat lokal. Pada umumnya konflik dapat muncul karena adanya perbedaan pikiran, ide, perkataan dan tindakan. Konflik dapat ditafsirkan sebagai hubungan antara dua atau lebih (anggota) atau efek yang tidak sejalan. Pengertian ini harus dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh.²⁰

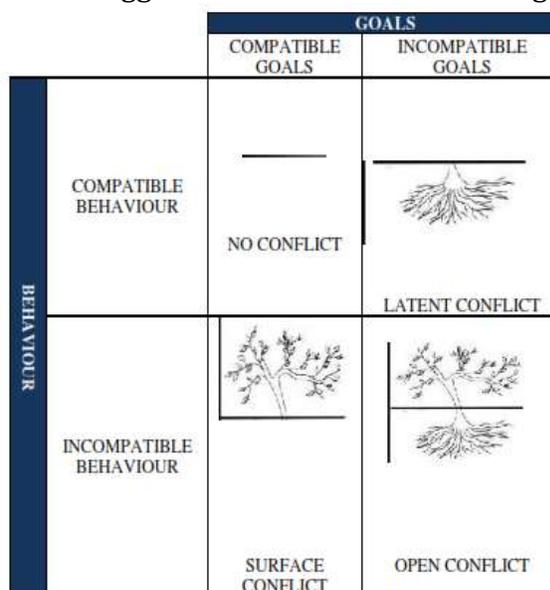
¹⁹ Glen Matthew, *Kepentingan Nasional dan Diplomasi ala Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya di Myanmar*, Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XIII, No.1, Januari - Juni 2020

²⁰ Fisher, Simon et al. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. London: The British Council. (2001)



Fakta menunjukkan dengan jelas bahwa konflik etnis sangat sulit diselesaikan dan akan berlangsung relatif lama dalam transformasi menuju perdamaian. Selain itu, konflik etnis bisa menjadi semakin rumit apabila berbenturan dengan dimensi kebudayaan, di mana kelompok-kelompok etnis tertentu memiliki identitas kebudayaan masing-masing, sehingga akan sulit disatukan, tanpa adanya konkretisasi untuk saling memahami sebagai entitas manusia yang damai dan memiliki peradaban.

Potensi konflik antara imigran etnis Rohingya dengan masyarakat lokal Indonesia secara umum merupakan potensi konflik dengan latar belakang Ideologi, Sosial-budaya, hukum, ekonomi, dan fanatik kedaerahan. Wujud konfliknya tersebut bisa bermacam-macam. Dari sekedar konflik simbolik hingga konflik fisik. Efeknya pun beragam, dari ringan hingga berat.²¹ Fisher kemudian menggambarkan konflik dalam diagram berikut:²²



Gambar 2. Goals and Behavior Conflict

Gambar di atas menunjukkan hubungan antara tujuan dan perilaku serta berkaitan dengan konflik:

- No conflict: A common perception may be that the box on the top left, no conflict is preferable. However, any peaceful group or society, if it is to endure, must be lively and dynamic, incorporating conflicts of behavior and goals and addressing them creatively.*
- Latent conflict is below the surface and, as already suggested may need to be brought in to the open before it can be effectively addressed.*
- Surface conflict has shallow or no root and may be only misunderstanding of goals that can be addressed by means of improved communication.*
- Open conflict is both, deep-rooted and very visible. and may require actions that address both the root*

²¹ Lay, Cornelis. 2009. *Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 13 (1):1-19.

²² Fisher, Simon, et al. 2007. *Working with conflict: skill and strategies for action*, http://books.google.co.id/books?id=YCPEoKBIS54C&pg=PT63&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false, accd 25.3.2013



Berdasarkan tipologi yang diformulasikan oleh Fisher, konflik antara pengungsi Rohingya dan penduduk lokal di Indonesia dapat dikategorikan sebagai No Konflik dan Laten Konflik, namun tidak menutup kemungkinan kedepannya akan menimbulkan surface konflik maupun open konflik apabila tidak dilakukan deteksi dini terhadap kemungkinan konflik yang akan muncul kedepannya.

Di Indonesia, beberapa permasalahan yang dihadapi pengungsi bermacam-macam. Pertama, mereka tidak diperbolehkan bekerja yang berarti bahwa kebutuhan keseharian mereka sangat minim terpenuhi, untuk tidak mengatakan tidak tercukupi, padahal mereka lari dari negaranya untuk hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Kedua, anak-anak dan remaja yang mencari perlindungan akan kesulitan memperoleh pendidikan yang seharusnya mereka terima selama masa produktif mereka, padahal pendidikan merupakan bagian dari hak-hak yang diakui sebagai hak asasi manusia. Ketiga, anak-anak yang lahir dari pasangan pengungsi mengalami kesulitan mengurus status kewarganegaraan anaknya, yang dapat mempengaruhi kejadian di masa depan, seperti akses ke perawatan kesehatan, pendaftaran dan layanan lain yang tersedia.²³

Beberapa masalah yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya di Indonesia dapat diselesaikan dengan beberapa hal berikut:

1. Memberikan pendidikan formal dan non-formal sementara pada pengungsi Rohingya.
2. Memberikan kesempatan kerja sementara bagi Rohingya agar tidak hanya bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah Indonesia selama masa pengungsian.
3. Bekerja sama dengan PBB dan Pemerintah Myanmar untuk mempercepat konflik di Myanmar

Dalam mengatasi ancaman konflik yang muncul diperlukan strategi pengelolaan konflik, yang mencakup penyusunan konsep Strategi Besar Pencegahan dan Pengelolaan Konflik (*Grand Strategy for Conflict Prevention and Management*). Selain itu juga diperlukan sebuah kerangka dinamis pencegahan konflik yang mampu mendeteksi dan merespon secara dini konflik yang terjadi. Dalam kerangka dinamis pencegahan konflik ini ada lima komponen utama antara lain, yaitu komponen eskalasi dan de-eskalasi, komponen faktor konflik, komponen aktor konflik, komponen pemangku kepentingan, dan komponen kemauan politik penguasa untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian.

Secara sosiologi, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang bersifat *asosiatif* diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat *dissosiatif* mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial *asosiatif* dapat dikatakan proses positif. Proses sosial yang *dissosiatif* disebut proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang *asosiatif* dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik.²⁴

Jenis resolusi konflik yang paling umum dipakai, yakni *konsiliasi*, *mediasi*, *arbitrasi*, *koersi* (paksaan), dan *détente*. Proses ini didasarkan pada praktik orang yang mencari

²³ Rohmad Adi Yulianto, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia: (Menegosiasikan Rezim Internasional, Kepentingan Nasional, Dan Solidaritas Keumatan Islam)*, 2020

²⁴ Drs. Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal.77



jawaban atas masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama membawa hasil²⁵, Yaitu:

1. **Konsiliasi (conciliation)**
Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.
2. **Mediasi (mediation)**
Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.
3. **Arbitrasi**
berasal dari kata latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi.
4. **Perwasitan**
Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

Sebelum sebuah konflik meluas, pemerintah sebaiknya berupaya melakukan pencegahan konflik. Pencegahan korban Konflik adalah proses mencegah terjadinya konflik, menghambat perkembangan konflik agar tidak lebih luas, serta menghindari terulangnya kembali terjadinya konflik. Pencegahan ini merupakan tindakan-tindakan untuk menghambat/ menghilangkan bahaya yang menyebabkan terjadinya konflik yang mempunyai akibat rosaknya kehidupan masyarakat. Secara lebih terperinci, pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti:

- a. Menghilangkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik yang akan terjadi di wilayah setempat;
- b. Mengurangi faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik;
- c. Menghindari terulangnya kembali konflik; dan
- d. Menghambat perkembangan terjadinya konflik.

KESIMPULAN

Sikap Indonesia terhadap pengungsi Rohingya disebabkan kesamaan identitas sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan pengungsi Rohingya yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di negaranya, Myanmar. Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia telah menunjukkan sikap yang baik dan siap menerima pengungsi Rohingya. Pada umumnya konflik dapat muncul karena adanya perbedaan pikiran, ide, perkataan dan tindakan. Konflik antara imigran Rohingya dengan masyarakat

²⁵ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.22.



Indonesia seringkali berujung pada sengketa agama, sosial, hukum, ekonomi dan regional. Konflik dapat mengambil banyak bentuk. Dari sekedar konflik simbolik hingga konflik fisik. Efeknya pun beragam, dari ringan hingga berat. Sebelum konflik meningkat, pemerintah akan berusaha mencegahnya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Zulkarnain, Indra Kusumawardhana. (2020). Bersama Untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya Di Aceh 2015. *Jurnal HAM*, Vol 11, No 1
- [2] Matthew, Glen. (2020). Kepentingan Nasional dan Diplomasi ala Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya di Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun XIII, No.1
- [3] Siba, M. Angela Merici., Anggi Nurul Qomari'ah. (2018). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya. *Islamic World and Politics*. Vol.2. No.2, ISSN: 2614-0535 E-ISSN: 2655-1330
- [4] Krustiyati, Atik. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia. *Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 UBAYA*
- [5] Loescher, Alexander Betts and Gil., *Refugees in International Relations*. (2011). *Refugees in International Relations*
- [6] Raharjo, Nur Sandy Ikfal. (2015). Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine Myanmar Tahun 2012-2013. *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol.6 No. 1.
- [7] Simbolon, Khairunnisa. (2017). Sikap Thailand Dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Dalam Pendekatan Konstruktivis. *Jurnal PIR* Vol.2 No. 1
- [8] Muhamad, Simela Victor. (2012). Tragedi Kemanusiaan Rohingya. *Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. IV, No. 15/I/P3DI/Agustus/2012
- [9] Nugraha, Fajar. (2015). Malaysia Tolak Imigran Rohingya Kecuali Kapal Mereka Karam. *Metro Tv*. diakses dari <http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/05/13/125452/malaysia-tolakimigran-rohingya-kecuali-kapal-mereka-karam> pada 27 Februari 2022
- [10] Triono. (2014). Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya. *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.2 Juli-Desember. 2014
- [11] Yulia, Anna Hartati. (2013). Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 2 No. 1.
- [12] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka
- [13] Fisher, Simon et al. (2001). *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. London: The British Council.
- [14] Jati, I. (2018). Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis. *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies (IKAT)*, 1(1): 17.
- [15] Ridwan, Bambang Wahyudi, Ningsih Susilawati. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Potensi Konflik Antara Imigran Timur Tengah Dengan Masyarakat Lokal di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*. Volume 5 Nomor 1
- [16] Yulianto, Rohmad Adi. (2020). Penanganan Pengungsi Di Indonesia: (Menegosiasikan Rezim Internasional, Kepentingan Nasional, Dan Solidaritas Keumatan Islam)
- [17] Soetomo. (1995). *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya



- [18] Nasikun. (2003). Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- [19] Anonim. (2015). Rohingya: Antara Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan. Masyarakat ASEAN Edisi 8 Juni 2015. Jakarta, 2015.
- [20] Anonim. (2018). Rohingya, 101 Data dan Fakta. PIARA. Diakses dari Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) PAHAM Indonesia.
<http://indonesia4rohingya.net/about/>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN